

Pengelolaan Bahasa Untuk Pembelajaran di Indonesia

Zuniar Kamaluddin Mabruuri

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Pacitan

zuniarmabruuri@gmail.com

Abstract

This study aims to understand language management for learning in Indonesia. The research method used is a qualitative method with the type of literature study. The results show that the State of Indonesia has carried out language management in relation to the recognition of existing languages and is regulating for the government in the context of the state and nation so that there is a triangular relationship between language and the state which is regulated by the government for the benefit of the nation. If the state has guaranteed the existence of a language as a whole, then a number of policies will emerge to guarantee the rights and obligations of each in managing the existing language. Policies are formulated in the form of rules known as regulations, to serve as joint guidelines between the government and speakers of existing languages.

Keywords:

language management, language recognition, rules

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan bahasa untuk pembelajaran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Indonesia telah melakukan pengelolaan bahasa berkaitan dengan pengakuan terhadap bahasa yang ada dan bersifat mengatur bagi pemerintah dalam konteks negara dan bangsa sehingga terjadi ikatan segi tiga hubungan yaitu bahasa dan negara yang diatur oleh pemerintah demi kepentingan bangsa. Jika negara telah menjamin keberadaan suatu bahasa secara utuh, maka muncul sejumlah kebijakan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola bahasa yang ada. Kebijakan diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan yang dinamakan sebagai regulasi, untuk dijadikan pedoman bersama antara pemerintah dan penutur bahasa yang ada.

Kata kunci:

pengelolaan bahasa, pengakuan bahasa, aturan-aturan

A. PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan rancangan sistematis yang dikomunikasikan melalui bahasa kepada pembelajar untuk membuat individu/pembelajar melakukan kegiatan belajar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Bahasa menjadi hal yang penting dalam pembelajaran karena pada prinsipnya kegiatan ini menitikberatkan pada bagaimana menggerakkan pembelajar untuk melaksanakan kegiatan belajar. Bahasa menjadi alat penyampai sehingga pembelajaran mencapai suatu titik tertentu sebagai suatu kompetensi yang

sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pemilik bahasa dalam berkomunikasi, beberapa unsur yang ada dalam pembelajaran menempatkan manusia sebagai unsur utama, sedangkan unsur yang lain merupakan pelengkap untuk bisa mengekspresikan bahasa dalam komunikasi pembelajaran.

Pembelajaran memiliki arti yang beragam menurut para ahli, Gagne dan Briggs (1979) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi

dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Sementara itu, Knirk dan Gustafson (1986) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Duffy dan Roehler (1989) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum.

Dimiyati dan Mudjiono (1999) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dalam UUSPN No. 20 (2003) dan Permendiknas (2008) dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dikemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses yang sistematis dengan melalui tahapan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagai usaha yang melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional dalam sebuah desain instruksional dengan menekankan pada penyediaan sumber belajar untuk membuat siswa/pembelajar belajar secara aktif.

Bagian penting dalam pembelajaran adalah pengelolaan bahasa. Pengaturan penggunaan bahasa-bahasa, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. Pengaturan itu dibuat oleh pemilik otoritas. Pengelolaan bahasa tersebut tidak selamanya bersifat eksplisit (perundang-undangan, legislasi, peraturan, dan sebagainya), melainkan dapat pula berupa praktik bahasa atau melalui kebijakan lain tetapi berimplikasi pada penggunaan bahasa

pada berbagai ranah dalam suatu komunitas tutur.

Pengelolaan bahasa yang telah diatur diharapkan mampu mencegah masalah-masalah seperti disiplin kelas, berurusan dengan perbedaan individu dengan kemampuan yang beragam, pengaturan tugas kelas, hubungan dengan orang tua, bahan ajar, ruang kelas yang penuh sesak, pengaturan tempat duduk, dan kegiatan budaya (Macias, 2018)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah bahasa pribumi atau bahasa lokal yang jumlahnya sekitar 700, dan satu bahasa nasional bahasa Indonesia serta jumlah bahasa asing yang juga digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan, tampaknya akan menimbulkan situasi kebahasaan yang perlu diantisipasi dan ditangani secara pengelolaan kebahasaan. Apabila terjadi saling pengaruh di antara bahasa-bahasa yang ada dan menimbulkan akses negatif atau saling merugikan, maka situasi kebahasaan dapat saja menimbulkan kerugian-kerugian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks nasional, di Indonesia pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus bahasa nasional sebenarnya secara implisit telah diputuskan ketika para tokoh kemerdekaan memutuskan untuk menulis teks proklamasi kemerdekaan republik indonesia 17 Agustus 1945 serta konstitusi negara (Undang-Undang Dasar RI 1945) pasal 36 yang menyatakan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut komitmen politik para pemuda dari berbagai daerah, 17 tahun sebelum kemerdekaan, untuk menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia yang

dituangkan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, "... Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia".

Dasar tersebut berimplikasi pada perlunya kebijakan bahasa yang mengatur tentang pengelolaan bahasa, Gurter & Cenoz (2017) menjelaskan bahwa hubungan langsung antara kebijakan bahasa dan penilaian dalam konteks multibahasa. Perbandingan itu ditempatkan dalam konteks pandangan yang berubah tentang penggunaan bahasa dalam pendidikan di mana pergeseran dapat diamati dari penekanan pada pemisahan bahasa ke pendekatan yang lebih sesuai dengan praktik sehari-hari multibahasa. Ini menyangkut pergeseran dari kebijakan isolasi bahasa dalam pengajaran dan penilaian bahasa menuju pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan bahasa sebagai sumber daya dan mempromosikan penggunaan repertoar linguistik secara keseluruhan. Namun, implementasi program berdasarkan pendekatan holistik masih terbatas dan penerapannya dalam penilaian bahasa sederhana. Tradisi dan ideologi satu bahasa tidak mudah menyerah. Kami menunjukkan beberapa contoh cara baru yang kreatif untuk mengembangkan kompetensi multibahasa dan keterampilan lintas bahasa.

Namun demikian, pengaturan yang lebih jelas tentang penggunaan bahasa-bahasa di Indonesia (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) baru dirumuskan tahun 1975. Itupun baru sebatas konsensus yang disepakati sebagai rumusan seminar politik bahasa nasional 1975 di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 Februari. Hasil perumusan tersebut diantaranya menyimpulkan bahasa pengantar. Bahasa yang dipakai secara

resmi untuk mengadakan komunikasi dengan sejumlah orang yang terhimpun dan terikat dalam suatu situasi yang formal, seperti rapat umum, rapat kerja, simposium, dan sebagainya. Dalam pengertian sempit bahasa pengantar adalah bahasa resmi yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam hubungan ini, penggunaan ketiga macam bahasa yang dirumuskan (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) sebagai bahasa pengantar akan dibatasi pada pengertian sempit itu, yaitu:

1. Bahasa Indonesia

Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali di daerah-daerah tertentu.

2. Bahasa Daerah

Sementara menunggu hasil penelitian jangka panjang mengenai kerugian dan keuntungan yang dapat diambil dari pemakaian bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai satu-satunya bahasa pengantar, bahasa daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar di daerah-daerah tertentu, dengan catatan bahwa bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran diajarkan mulai kelas satu sekolah dasar.

3. Bahasa Asing

- a. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyajikan mata pelajaran bahasa asing yang bersangkutan;

- b. Bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi pada jurusan bahasa asing tersebut;
- c. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi oleh tenaga pengajar asing yang tidak menguasai pemakaian bahasa Indonesia.

Seminar politik bahasa selanjutnya yaitu pada tanggal 8-12 November 1999 di Bogor Jawa Barat yang merumuskan di bidang pengajaran bahasa sebagai berikut

1. Bahasa Indonesia (Termasuk BIPA)

Pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan bahasa itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. Pengembangan kurikulum bahasa Indonesia;
 - b. Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
 - c. Pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
 - d. Pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa.
- #### 2. Bahasa Daerah

Pengajaran bahasa daerah ditujukan untuk meningkatkan

mutu penguasaan dan pemakaian bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya. Peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. Pengembangan kurikulum bahasa daerah;
- b. Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
- c. Pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
- d. Pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai;
- e. Penyediaan program pendidikan bahasa daerah di jenjang pendidikan tinggi setempat;
- f. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas permulaan padajenjang pendidikan dasar.

3. Bahasa Asing

Pengajaran bahasa asing ditujukan kepada upaya penguasaan dan pemakaian bahasa asing, terutama untuk pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam menyikapi persaingan bebas pada era globalisasi, agar lebih banyak orang Indonesia yang mampu memanfaatkan informasi dalam bahasa asing. Peningkatan mutu pengajaran bahasa asing dilakukan melalui kegiatan berikut:

- a. Pengembangan kurikulum bahasa asing;
- b. Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam era global dan dengan perkembangan

- metodologi pengajaran bahasa;
- c. Pengembangan tenaga pengajar bahasa asing yang profesional;
- d. Pengembangan sarana pengajaran bahasa asing yang memadai;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bahasa asing.

Sesuai dengan sifat dan jenis pendidikan, pengajaran bahasa asing ada yang bersifat wajib dan ada yang pilihan. Mata pelajaran bahasa asing pilihan hendaknya diberikan sekurang-kurangnya 90 jam dalam satu tahun ajaran. Dalam hubungan dengan pengajaran bahasa asing, ada tiga kelompok bahasa asing yang perlu diperhatikan yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa asing lain.

Dasar selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VII Bahasa Pengantar pasal 33 yang terdiri dari 3 pasal, yaitu:

1. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Kebijakan penggunaan bahasa secara formal baru lahir setelah pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sebagai amanah amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, khususnya pasal 36C.

Undang-undang ini mengukuhkan bahwa bendera negara, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan jati diri bangsa, identitas, dan simbol eksistensi serta kedaulatan negara kesatuan republik indonesia.

Pengelolaan bahasa dalam pembelajaran tertuang pada pasal 29 penggunaan bahasa Indonesia pasal 29 yang terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
2. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Di Indonesia, pengguna bahasa berhadapan dengan keberadaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Biasanya, anak pada awalnya akan terpengaruh bahasa ibunya. Bahasa Ibu adalah bahasa pertama yang dikenal oleh seorang anak melalui ibunya. Di Indonesia, bahasa ibu dapat berupa bahasa daerah (*indigenous language*) mengingat bahwa Indonesia memiliki sekitar 700 bahasa daerah. Bahasa ibu dapat pula berupa bahasa Indonesia. Bagi anak-anak yang dibesarkan di kota-kota besar, bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia. Bagi seorang anak yang lahir di luar negeri atau yang salah satu orang tuanya, terutama ibunya, merupakan orang asing, bahasa ibu anak itu adalah bahasa asing, bergantung pada tempat kelahirannya atau bahasa yang digunakan salah seorang orang tuanya. Jadi, bahasa pertama seorang anak merupakan bahasa awal yang dikenalnya.

Zulela (2012) menyatakan pengajaran bahasa Indonesia selama ini,

adalah pengajaran bahasa layaknya bahasa pertama. Anak dianggap sudah memiliki keterampilan berbahasa dasar dalam bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa diberikan dengan anggapan anak sudah mengetahui cara melafalkan kata dan memahami arti kata dalam bahasa Indonesia. Intonasi juga dianggap sudah dikuasai dan mengabaikan kenyataan bahwa lafal dan intonasi bahasa daerah berbeda dari bahasa Indonesia. Dalam kenyataannya, tidak selalu semudah itu.

Bahasa asing merupakan bahasa yang kaidahnya, kadang-kadang aksaranya, dan konsepnya sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Berarti, bahasa diajarkan sebagai bahasa yang sama sekali belum dikenal oleh anak. Semua diajarkan: pelafalan, kosakata, tata bahasa, situasi, bahkan cara menulis diajarkan untuk bahasa tertentu, seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, dan sebagainya.

Zulela (2012) menyatakan bahwa di Indonesia, situasi kemampuan berbahasa anak-anak bervariasi. Seorang anak dapat disebut sebagai seorang yang monolingual (menguasai satu bahasa); bilingual (menguasai dua bahasa); atau seorang yang poliglot (menguasai lebih dari dua bahasa). Seorang anak yang dibesarkan di daerah perkotaan, ditambah dengan orang tua yang berpendidikan tinggi, akan mampu berbahasa Indonesia dan mungkin bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Seorang anak yang dibesarkan di daerah pinggiran kota, mungkin dengan orang tua yang berpendidikan tinggi, mungkin pula tidak, akan mampu berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia. Seorang anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dan, mungkin, terpencil hanya mampu berbahasa daerah.

Keadaan itu menunjukkan bahwa seorang anak sejak dini mampu menjadi seseorang yang poliglot (menguasai banyak bahasa sekaligus). Tentu, dengan akibat tertentu, misalnya anak akan lamban berbicara. Kelambanan terjadi karena anak sibuk mengingat kata yang didengarnya; memisahkannya dalam kelompok bahasa berbeda; dan mempelajari kepada siapakah suatu bahasa digunakan. Setelah melampaui usia dua tahun, anak akan mulai berbicara. Pada usia enam tahun, anak akan memilih bahasa yang akan dikembangkan. Bahasa yang jarang digunakan akan disimpan dalam ingatannya (memorinya). Nanti, suatu saat, bahasa tersebut akan dengan mudah diingatnya jika ia mempelajari bahasa tersebut.

Situasi yang beragam seperti yang digambarkan di atas menjadi masalah dalam pendidikan Indonesia. Banyak sekolah, apalagi sekolah yang berlabel 'sekolah berbasis agama atau sekolah internasional', yang selain mengajarkan bahasa asing sejak dini, juga menggunakan bahasa asing sebagai bahasa instruksional di sekolahnya. Bolehkah bahasa asing diajarkan sejak dini?. Tentu, boleh. Akan tetapi, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pengajaran bahasa asing dan bahasa Indonesia harus diberikan dengan intensitas yang sama. Kedua, pengajar bahasa asing harus menguasai bahasa asing dengan fasih. Jangan sampai ada kesalahan gramatikal atau lafal saat mengajarkan kepada siswa. Sekali kesalahan tersebut terjadi, anak akan terus membawanya hingga dewasa.

Permasalahannya terbesar terjadi karena sekolah internasional mengajarkan bahasa asing tanpa mengajarkan bahasa Indonesia. Seringkali, sekolah memberikan jumlah jam yang lebih sedikit untuk bahasa

Indonesia dibandingkan bahasa asing. Akibatnya, anak justru tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Akibat budaya yang lebih besar adalah anak menjadi tersisih dari bangsanya sendiri. Anak lebih dapat bergaul dengan orang asing sehingga ia bersekolah di luar negeri (memang, orang tuanya mempersiapkannya untuk itu) dan tentu lebih senang bekerja dan tinggal di luar negeri dibandingkan di Indonesia.

C. SIMPULAN

Pengelolaan bahasa berkaitan dengan pengakuan terhadap bahasa yang ada dan bersifat mengatur bagi pemerintah dalam konteks negara dan bangsa. Dengan demikian terjadi ikatan segi tiga hubungan yaitu bahasa dan negara yang diatur oleh pemerintah demi kepentingan bangsa. Jika negara telah menjamin keberadaan suatu bahasa secara utuh, maka muncul sejumlah kebijakan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola bahasa yang ada. Kebijakan diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan yang dinamakan sebagai regulasi, untuk dijadikan pedoman bersama antara pemerintah dan penutur bahasa yang ada.

Perlu adanya kajian terhadap hasil penelitian UNESCO (2007) bahwa pengajaran bahasa Indonesia tidak selalu harus diberikan sebagai bahasa pertama, melainkan sebagai bahasa kedua, setelah bahasa ibu. Menurut pengenalan huruf, angka, dan konsep keseharian atau lingkungan sebaiknya diberikan dalam bahasa ibu yang dikenal anak. Sebaiknya, di kelas satu hingga tiga, bahasa ibu digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia dapat digunakan jika ada konsep yang tidak ditemukan dalam bahasa ibu.

Barulah berangsur-angsur diperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Biasanya, diawali di kelas 4 dan seterusnya. Bahasa Inggris, sebagai bahasa dunia, diperkenalkan sebagai bahasa asing dan mulai diajarkan di jenjang SMP dan seterusnya. Bahasa asing lainnya, seperti Mandarin, Arab, Jerman, Perancis diajarkan mulai jenjang SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan & Sugono, Dendy (Ed.). (2011). *Politik bahasa rumusan seminar politik bahasa*. 2011. Jakarta: Kemendikbud.
- Depdikbud. (1975). *Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Dimiyati dan Mudjiono. (1999). *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Duffy and Rochler. (1989). *Improving classroom reading instruction*. New York: Random House.
- Gagne, R. & Briggs, L.J. (1979). *Principle of instructional design*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Gurter, D & Cenoz, J. (2017). *Language education policy and multilingual assessment*. *Language Education*. 31 (3), 231-248.
- Knirk, F.G. dan Gustafson, K.L. (1986). *Instructional technology, a systematic approach to education*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Macias, D.F. (2018). *Classrom management in foreign language education: An Explanatory review*. *Profile*. 20 (1), 153-166.

- Permendiknas No. 41 Tahun 2007.
Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- UNESCO. (2007). *Improving the quality of mother tongue-based literacy and learning: Case studies from asia, africa, and south america.* Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education.